

## **ABSTRAK**

**Mujiati (0810612033), Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dibawah bimbingan Drs Djamhari Hamza, SH, MH, MM.**

Pemerintah dalam rangka melakukan berbagai kegiatan tidak hanya menggunakan instrument yuridis (Undang-Undang dan Keputusan) melainkan juga fungsi administrasi yang dimilikinya dapat memberikan pelayanan dan fungsinya secara maksimal kepada masyarakat.

Pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah pusat ataupun daerah oleh undang-undang merupakan konsekuensi logis, karena pemerintah bukan hanya kepada eksekutif melainkan juga sebagai kepala pemerintahan pusat ataupun di daerah. Hal ini dapat dimengerti karena tugas dan fungsi birokrasi pemerintah adalah merupakan jembatan penghubung antara kepentingan Negara dengan kepentingan rakyatnya.

**Kata kunci : motivasi kerja, kedisiplinan kerja**

## **ABSTRACT**

**Mujiati (0810612033), Against Judicial Review of Government Policy in Application of sanctions for the Civil Service. Under the guidance of Drs Djamhari Hamza, SH, MH, MM.**

Government in order to perform a variety of activities are not only using legal instruments (Laws and Decisions) but also of its administrative functions to provide services and functions to its full potential to the community.

Granting broad authority to the central government or local laws is a logical consequence, since the government is not only the executive but also as head of the local or central government. This is understandable because the duties and functions of the bureaucracy government is a bridge between state interests with he interests of its people.

**Key words : work motivation, work discipline**